BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Demokrasi merupakan sistem politik yang menempatkan setiap warga negara yang sudah dewasa untuk memiliki hak dalam memilih dan dipilih pada gelaran pemilihan umum.[1] Pengaruh utama dari demokrasi adalah partisipasi politik. Huntington dan Nelson mengartikan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara (*private citizen*) yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.[2] Partisipasi politik sangat penting bagi suatu sistem demokrasi, bahkan demokrasi dapat diukur melalui tingkat partisipasi politik masyarakat di suatu negara. Salah satu bentuk partisipasi politik adalah berpartisipasi dalam gelaran pemilihan umum, kegiatan tersebut dikenal dengan istilah partisipasi pemilih.[3]

Pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum selalu menjadi topik yang menarik untuk diteliti lebih dalam. Partisipasi pemilih secara khusus merujuk pada kegiatan setiap warga negara untuk mengikuti setiap proses pemilihan umum, mulai dari pra pemilihan, waktu pemilihan sampai kepada evaluasi hasil pemilu, dengan demikian partisipasi pemilih lebih terfokus

---

[1] Anwar Nasution. 1994. *Pembangunan dan Demokratisasi Sistem Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Paramadina. Hal. 60.
[2] Samuel P Huntington and Joan M Nelson. 1976. *Not Easy Choice: Political Participation in Developing Countries.* Cambridge, MA dan London, England: Harvard University Press. Hal. 4.
[3] Ari Pradhanawati, Fitriyah, Gregorius Sahdan, dan Mustofa Agung Sardjono. 2022. *Partisipasi Mahasiswa Dalam Pilkada Serentak 2020*. Yogyakarta: CV Istana Agency. Hal. 1–52.

pada keterlibatan dalam proses pemilihan.[4] Sebagaimana negara demokrasi, Indonesia telah menetapkan peraturan dalam pelaksanaan pemilihan umum, tercatat bahwa yang memiliki hak memilih adalah warga negara Republik Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.[5] Indonesia juga memberikan aturan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak pilih juga dapat tidak menyalurkan hak pilihnya, dengan demikian maka sangat mungkin angka partisipasi pemilih seperti pemberian suara dapat berubah dan bahkan masyarakat bisa saja tidak peduli terhadap proses pemilu.

Di Indonesia, partisipasi pemilih masih dimaknai secara sempit, padahal partisipasi pemilih tidak sekedar angka yang menggunakan hak suaranya pada saat pemungutan suara, namun partisipasi pemilih juga dilihat pada tahapan atau aktivitas kepemiluan yang lain seperti mengikuti diskusi politik tentang isu calon, menghadiri kampanye, atau menyebarkan informasi tentang calon pemimpin. Lebih jauh, kita juga perlu menganalisa partisipasi dari sisi kualitas, sehingga partisipasi tidak sekedar terjebak dari aspek kuantitas saja. Hal ini tentu menjadi harapan demi terwujudnya demokrasi yang tidak sekedar prosedural, namun juga demokrasi yang bersifat substansial untuk kehidupan politik Indonesia di masa yang akan datang.[6]

[4] Martien Herna Susanti dan Dan Setiajid. 2020. *Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3: Model Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kota Semarang Tahun 2020*. Semarang: LPPM Universitas Negeri Semarang. Hal. 30-53.
[5] Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 (25).
[6] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2024. *Indeks partisipasi pemilu (IPP) 2024*. Jakarta: KPU RI. Hal. 1-71.

Partisipasi pemilih juga erat kaitannya dengan tingkat kepercayaan warga negara terhadap sistem politik, penyelenggara pemilu, serta individu atau kelompok yang akan mewakili mereka dalam pemerintahan dan parlemen.[7] Oleh sebab itu banyak negara demokrasi di dunia, termasuk Indonesia, menganggap partisipasi pemilih sebagai faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam proses pemilihan umum, bahkan dalam sejarah pemilu di Indonesia, tingkat partisipasi pemilih sering kali dijadikan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pemilu.[8]

Penelitian mengenai partisipasi pemilih tidak hanya memberikan gambaran tentang perbedaan tingkat partisipasi antar wilayah yang memetakan rata-rata partisipasi pemilu dari waktu ke waktu, namun juga akan menjelaskan bagaimana perilaku pemilih masyarakat pada setiap gelaran pemilu.[9] Partisipasi pemilih juga dapat memberikan gambaran bagaimana perbedaan partisipasi masyarakat dalam mengikuti banyaknya model pemilihan seperti pemilihan presiden, legislatif, maupun pada pemilihan kepala daerah.

Pada pemilihan kepala daerah, masyarakat secara sukarela menyalurkan kehendak politiknya tanpa tekanan dari pihak manapun, sistem ini diwujudkan melalui kebebasan memilih calon yang diinginkan dan mendukung program

[7] Moch. Nurhasim. 2014. *Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014: Sebuah Studi Penjajakan.* Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hal. 2.
[8] Maya Enjelia dan Frisna Silvilia. 2024. Pengaruh Partisipasi Politik Dalam Pemilu 2024. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin.* Vol. 3 No. 5. Hal. 76–81.
[9] Muhammad Saleh. 2018. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah: Studi Voter Turnout Masyarakat Kota Tebing Tinggi dalam Pilkada Tahun 2017 dengan Calon Tunggal. *Tesis.* Universitas Andalas. Hal. 6.

unggulan yang ditawarkan selama masa kampanye.[10] Hal ini mencerminkan bahwa sistem demokrasi telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses politik.[11] Sehingga pada proses pelaksanaannya, pemilihan umum dengan angka partisipasi pemilih yang tinggi dipandang sebagai suatu keberhasilan sistem demokrasi yang baik.

Partisipasi pemilih yang tinggi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terjadi di masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Verba dan Nie, mereka menyatakan bahwa sebagian besar partisipasi ditentukan oleh status sosial ekonomi.[12] Conway juga menegaskan melalui berbagai penelitian bahwa individu dengan tingkat pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan yang lebih baik cenderung lebih aktif berpartisipasi dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah, berpenghasilan kecil, atau bekerja sebagai buruh kasar, ketiga aspek tersebut terangkum dalam variabel yang dikenal sebagai status sosial ekonomi.[13]

Selanjutnya juga terdapat faktor yang diperkirakan mempengaruhi tinggi-rendahnya partisipasi seseorang dalam pemilihan umum, faktor tersebut yaitu kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Kesadaran politik adalah sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik,

---

[10] Sarbaini. 2014. Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 7 No. 3. Hal. 16–17.
[11] Umbu Rauta. 2016. Menggagas Pemilihan Presiden Yang Demokratis Dan Aspiratif. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 11 No. 3. Hal. 600.
[12] Norman H Nie, dan Sidney Verba. 1972. *Participation in America: Political Democracy and Social Equality*. Chicago: University of Chicago Press. Hal. 7.
[13] Mary Margaret Conway. 1986. *Political Participation in the United States*. Washington, DC: CQ Press. Hal. 807-808.

serta menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat tempat dia hidup. Miriam Budiardjo mengatakan bahwa "Partisipasi pemilih memiliki hubungan yang erat dengan kesadaran politik, karena semakin seseorang menyadari bahwa dirinya berada di bawah pemerintahan, semakin besar pula keinginannya untuk menuntut hak agar bisa berpendapat dalam penyelenggaraan pemerintahan."[14]

Selain status sosial ekonomi dan kesadaran politik, terdapat faktor lain yang kemudian juga mempengaruhi partisipasi pemilih masyarakat. Samuel P. Huntington menjelaskan bahwa partisipasi politik masyarakat didasarkan atas dua kecenderungan, yaitu atas dasar kesadaran yang kemudian melahirkan partisipasi yang otonom (*autonomous participation*) dan atas dasar ajakan atau digerakkan orang lain (*mobilized participation*).[15] Mobilisasi politik kemudian bertujuan untuk menggiring setiap warga dalam upaya untuk keterlibatan mereka pada politik, sehingga dalam konteks mobilisasi politik, partai dan aktor politik berlomba dalam memanfaatkan ilmu ini untuk strategi kampanye dalam memperoleh suara pada pemilihan umum.[16]

Status sosial ekonomi yang baik dan kesadaran politik yang dihadirkan masyarakat serta mobilisasi politik inilah yang mendorong tingginya angka partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kota Sawahlunto. Tercatat bahwa Kota Sawahlunto menjadi daerah yang paling tinggi angka partisipasi pemilihnya yaitu mencapai 80,1%, angka ini sangat tinggi

[14] Miriam Budiardjo. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 367-369.
[15] Samuel P Huntington and Joan M Nelson. Op.cit. Hal. 4
[16] Bartolini, Stefano. 2007. *The Political Mobilization of the European Left, 1860-1980: The class Cleavage*, Digital printed version. New York: Cambridge University Press.

dibandingkan dengan rata-rata angka partisipasi pemilih di Sumatera Barat yang hanya mencapai 63,32%, sedangkan rata-rata angka partisipasi pemilih nasional pada pilkada 2024 juga hanya mencapai 70%.[17]

Terlihat bahwa status sosial ekonomi, kesadaran politik dan mobilisasi politik dapat mempengaruhi angka partisipasi pemilih masyarakat, bahkan ketiga hal ini juga memiliki hubungan yang erat, Miriam Budiardjo mengatakan bahwa kesadaran politik biasanya muncul pada individu yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, kehidupan yang lebih mapan, serta berasal kalangan yang berpengaruh.[18] Namun, mobilisasi politik oleh elit atau kandidat juga memainkan peran penting dalam melonjaknya angka partisipasi pemilih, sehingga keterlibatan masyarakat pada pemilihan umum memiliki banyak faktor baik secara murni untuk memilih maupun dengan cara mobilisasi politik.

Penelitian tentang partisipasi pemilih telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti Mufidah (2019)[19] yang membahas pengaruh faktor otonom dan faktor mobilisasi terhadap partisipasi. Pratiwi (2023)[20], Kurnia (2024)[21] dan Brutu (2024)[22] yang membahas status sosial ekonomi mempengaruhi partisipasi

---

[17] Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto. 2024. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 579 Tahun 2024*. Sawahlunto, Sumatera Barat: KPU Kota Sawahlunto.
[18] Ibid. Hal. 4.
[19] Amalia Mufidah, dkk. 2019. Pengaruh Faktor Otonom dan Faktor Mobilisasi Terhadap Partisipasi Mahasiswa Rantau dalam Pemilu 2019. *Jurnal Respon Publik*. Vol. 13, No. 5, Tahun 2019, Hal: 39-47
[20] Mirza Ayunda Pratiwi, Rizqi Apriani Putri, dan Mahadiansar. 2023. Political Participation and Socioeconomic Status (SES) the Governor Election in Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora: Ganaya*. Vol. 6 No. 3. Hal. 731-739.
[21] Wildanul Fajri Kurnia, Auliya Putri Dewi, dan Defaza Aghnia Arlianto. 2024. Analisis Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu. *Prosiding Seminar Nasional Sosial*. Vol. 1 No. 1. Hal. 1-5.
[22] Saparudin Brutu, Johana A. Nainggolan, Gelora R. Sembiring, Wulan A. Trisna, Geby Nainggolan, Putri Andini, dan Prayitno. 2024. Analisis Hubungan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Warga Negara (Studi Kasus Di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan). *Indonesian Journal of Education and Development Research*. Vol 2 No. 1. Hal. 137-146.

pemilih. Apriyanti (2024)[23] yang membahas kesadaran politik mempengaruhi partisipasi pemilih, serta Kustiana (2021)[24] membahas status sosial ekonomi dan kesadaran politik mempengaruhi partisipasi pemilih.

Dari beberapa penelitian terdahulu, penelitian terkait partisipasi pemilih sudah banyak dilakukan, akan tetapi penelitian yang berfokus membahas secara lengkap antara status sosial ekonomi, kesadaran politik dan mobilisasi politik masih jarang ditemukan. Penelitian ini bermaksud untuk mengisi kekosongan penelitian-penelitian terdahulu dengan lebih fokus untuk menguji bagaimana indikator status sosial ekonomi menurut Ramlan Surbakti yang meliputi tingkat pendidikan, pekerjaan dan pendapatan yang dikaitkan dengan indikator kesadaran politik menurut Almond dan Verba yaitu kognitif, afektif dan evaluatif serta teori mobilisasi politik menurut Stefano Bartolini yang memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih masyarakat Kota Sawahlunto pada pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, Kota Sawahlunto termasuk daerah dengan status sosial ekonomi yang tinggi, hal ini ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,42 (2023), dan angka partisipasi sekolah menurut kelompok umur (16-18) mencapai 91,08% tertinggi kedua di seluruh kota/kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Sementara itu angka kemiskinan Kota Sawahlunto per 2024 sekitar 2,33

[23] Willya Apriyani, Muhammad Mona Adha, dan Edi Siswanto. 2024. Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Kampung Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang. *Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik: Sosial Simbiosis*. Vol. 1 No. 4. Hal. 66-68

[24] Putri Berlianty Ayu Kustiana. 2021. Pengaruh Tingkat Sosial Ekonomi Dan Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Etnis Tionghoa Kelurahan Kranggan Kota Semarang Dalam Pemilihan Umum 2019. *Journal of Politic and Government* Studies. Vol. 10 No. 3. Hal. 275-286.

persen yang menjadikannya daerah no 2 angka kemiskinan terendah Indonesia.[25] Selanjutnya juga ditemukan bahwa adanya dugaan pelanggaran berupa kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk ancaman dan praktik politik uang di salah satu kecamatan di Kota Sawahlunto yaitu Kecamatan Barangin. Pelanggaran ini diduga telah merusak moral politik dan mencederai prinsip kerahasiaan pemilu. Beberapa pemilih diketahui menitipkan pencoblosannya kepada pihak lain, yang berimplikasi pada pelanggaran asas kerahasiaan suara.

Dari data yang dikeluarkan oleh KPU Sumatera Barat menunjukan bahwa Kota Sawahlunto menorehkan angka partisipasi pemilih paling tinggi pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Sumatera Barat, tercatat angka partisipasi pemilihnya mencapai 80,1%, angka ini sangat tinggi dibandingkan dengan rata-rata angka partisipasi pemilih di Sumatera Barat yang hanya mencapai 63,32%, dan angka partisipasi pemilih nasional pada pilkada 2024 juga hanya mencapai 70%. Maka dari itu, peneliti ingin melihat Hubungan status sosial ekonomi, kesadaran politik dan mobilisasi politik terhadap tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah di Kota Sawahlunto tahun 2024.

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Pembahasan mengenai partisipasi pemilih pada pemilihan umum selalu menjadi topik menarik untuk diteliti lebih dalam. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memberikan aturan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak pilih

[25] BPS Kota Sawahlunto. 2024. *Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat, 2021-2023.* https://sawahluntokota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjA2IzI=/indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-kabupaten-kota-di-sumatera-barat.html. Diakses pada Kamis, 12 Desember 2024 pukul 23.12.

juga dapat tidak menyalurkan hak pilihnya, dengan demikian maka sangat mungkin angka partisipasi pemilih dapat berubah dan bergantung kepada faktor-faktor lain. Penelitian mengenai partisipasi pemilih juga menunjukkan perbedaan tingkat partisipasi antar wilayah serta memetakan rata-rata partisipasi pemilu dari waktu ke waktu.

Pada pemilihan umum tahun 2024, sangat menarik ketika melihat angka partisipasi pemilih yang ada di Kota Sawahlunto, ditemukan bahwa Kota Sawahlunto menjadi daerah yang paling konsisten dalam mempertahankan angka partisipasi pemilihnya, Kota Sawahlunto mencatatkan angka partisipasi pemilih selalu di atas 80% baik itu pada pemilihan presiden dan legislatif maupun pada pemilihan kepala daerah.[26]

Tabel 1. 1
Perbandingan Pengguna Hak Pilih Pada Pemilihan Gubernur Di Kota Sawahlunto Pada Pemilu Tahun 2015, 2020, 2024

Data Pemilih	Pemilu 2024		
	2015	**2020**	**2024**
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)	43.248	46.975	49.573
Pengguna Hak Pilih	**23.057 (53,3%)**	**25.366 (53,9%)**	**39.730 (80,1%)**
Suara Sah	22.572	24.800	38.567
Tidak Sah	485	566	1.163
Tidak Menggunakan Hak Pilih (Golput)	20.191	21.609	9.843

Sumber: KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Dari tabel di atas terlihat angka partisipasi pemilih di Kota Sawahlunto pada gelaran pemilihan umum tahun 2015, 2020, 2024 mengalami kenaikan yang

[26] Ibid.

drastis, walaupun tahun 2020 adalah masa pandemi dengan keterbatasan akses keluar rumah, angka partisipasi pemilih tetap lebih dari periode 2015 dan pada tahun 2024 Kota Sawahlunto berhasil menorehkan angka partisipasi pemilih lebih dari 80% dan menjadikan yang tertinggi di Sumatera Barat.

Tabel 1. 2
Persentase Pengguna Hak Pilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Sumatera Barat Tahun 2024

Nama Kota/ Kabupaten	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Pemilih (DPT)	Persentase
Pesisir Selatan	225.768	377.596	59,7%
Sijunjung	107.462	173.347	61,9%
Tanah Datar	166.909	280.326	59,5%
Lima Puluh Kota	158.617	290.865	54,5%
Pasaman	146.206	218.980	66,7%
Kep Mentawai	44.630	66.747	66,8%
Padang Pariaman	161.007	323.514	49,7%
Kabupaten Solok	168.268	290.111	58,0%
Kota Solok	38.390	58.076	66,1%
Solok Selatan	84.675	127.527	66,3%
Pasaman Barat	186.046	311.171	59,7%
Agam	191.763	382.405	50,1%
Padang	327.401	665.126	49,2%
Dharmasraya	96.924	168.913	57,3%
Bukittinggi	61.803	97.517	63,3%
Payakumbuh	62.831	104.308	60,2%
Sawahlunto	**39.730**	**49.573**	**80,1%**
Kota Pariaman	50.681	72.660	69,7%
Padang Panjang	29.958	44.322	67,5%

Sumber: KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Data pengguna hak pilih di Kota Sawahlunto yaitu sebanyak 39.730 dari 49.573 DPT yang ada, artinya angka partisipasi pemilih di kota Sawahlunto dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2024 mencapai 80,01 %. Angka ini merupakan yang paling tinggi diantara kota/kabupaten lain yang ada di Sumatera Barat.

Senada dengan data persentase pengguna hak pilihnya peneliti akan mencoba melihat bagaimana keterkaitan partisipasi pemilih jika dikaitkan dengan angka kemakmuran di Kota Sawahlunto yang ditandai dengan persentase penduduk miskin, karena Lipset secara jelas menyatakan bahwa semakin tinggi kemakmuran ekonomi, semakin besar pula kemungkinan terwujudnya demokrasi. Dengan kata lain, modernisasi sosial ekonomi akan menghasilkan tingkat demokrasi yang lebih tinggi. Demokrasi politik yang dimaksud oleh Lipset adalah tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, dimana semakin banyak anggota masyarakat negara yang berpartisipasi dalam pemilu.[27]

Selain ekonomi, Lipset juga menjelaskan sedikit tentang faktor pendidikan terhadap partisipasi pemilih. Lipset mengatakan ada bukti empiris yang menunjukan bahwa tingkat pendidikan berkorelasi positif bagi terwujudnya demokrasi di suatu negara tersebut artinya adalah semakin tinggi tingkat pendidikan di suatu daerah maka akan menunjang sistem demokrasi dalam artian partisipasi pemilih pada pemilu di daerah tersebut.[28]

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Tabel 1. 3
Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kota Sawahlunto
Tahun 2019 – 2023

Tahun	IPM Kota Sawahlunto	IPM Sumatera Barat
2019	**72,39**	72,39
2020	**72,64**	72,38
2021	**72,88**	72,65
2022	**73,73**	73,26
2023	**74,42**	73,75

[27] Seymour Martin Lipset. 1959. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. *The American Political Science*. Vol 53 No. 1. Hal. 69–105.
[28] Ibid. Hal. 72.

Sumber: Sumbar.bps.go.id

Tabel 1. 4
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022-2024 Di Sumatera Barat

Kota/ Kabupaten	2022	2023	2024
Pesisir Selatan	7,11	7,34	7,49
Kabupaten Solok	7,12	7,13	7,31
Kep Mentawai	13,97	13,72	13,89
Sijunjung	6,00	5,88	5,78
Tanah Datar	4,26	4,16	4,28
Padang Pariaman	6,25	6,34	6,27
Agam	6,22	6,20	6,83
Lima Puluh Kota	6,59	6,80	6,92
Pasaman	6,85	6,80	6,74
Solok Selatan	6,51	6,45	6,56
Dharmasraya	5,56	5,56	5,32
Pasaman Barat	6,93	6,92	7,00
Padang	4,26	4,17	4,06
Kota Solok	3,02	3,05	3,07
Payakumbuh	5,66	5,44	5,19
Sawahlunto	**2,28**	**2,27**	**2,33**
Pariaman	4,13	4,20	4,26
Padang Panjang	5,14	5,24	5,20
Bukittinggi	4,46	4,11	4,31
Sumatera Barat	5,92	5,95	5,97

Sumber: Sumbar.bps.go.id

Terlihat di tahun 2022-2024 angka kemiskinan Kota Sawahlunto terlihat sangat rendah dibanding kota atau kabupaten lain yang ada di Sumatera Barat, bahkan Kota Sawahlunto menduduki peringkat ke 1 angka kemiskinan terendah di Indonesia tahun 2023. Angka IPM Kota Sawahlunto juga menunjukan konsistensi dan selalu lebih tinggi dari rata rata angka IPM Sumatera Barat.[29] Terjadinya peningkatan partisipasi pemilih sangat berkaitan dengan status sosial

[29] BPS Kota Sawahlunto. 2024. *Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat, 2021-2023.* https://sawahluntokota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjA2IzI=/indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-kabupaten-kota-di-sumatera-barat.html. Diakses pada Jumat, 13 Desember 2024 pukul 00.06.

ekonomi, yang berarti kemajuan sosial ekonomi dapat mendorong peningkatan partisipasi pemilih. Sebaliknya, status sosial ekonomi yang lebih rendah dapat mempengaruhi turunnya tingkat partisipasi pemilih di suatu daerah dalam skala yang lebih kecil. Senada dengan hal ini pendidikan juga menjadi salah satu faktor besar yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih masyarakat.[30]

Tabel 1. 5
Indikator Pendidikan Masyarakat Kota Sawahlunto
Dalam Persentase 2023

Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur		
	7-12	13-15	16-18
Kab. Kepulauan Mentawai	99,9	95,89	78,19
Kab. Pesisir Selatan	99,85	96,91	83,08
Kab. Solok	99,74	91,55	76,29
Kab. Sijunjung	99,86	96,26	73,4
Kab. Tanah Datar	99,49	93,79	87,26
Kab. Padang Pariaman	99,88	97,63	82,16
Kab. Agam	99,94	95,82	86,07
Kab. Lima Puluh Kota	99,41	99,28	78,28
Kab. Pasaman	99,82	97,69	80,5
Kab. Solok Selatan	99,96	99,27	81,95
Kab. Dharmasraya	98,69	96,75	78,31
Kab. Pasaman Barat	99,5	95,88	87,11
Kota Padang	99,9	98,02	89,45
Kota Solok	99,76	96,03	90,86
Kota Sawahlunto	**99,58**	**96,94**	**91,08**
Kota Padang Panjang	99,89	99,54	90,38
Kota Bukittinggi	99,8	99,97	91,15
Kota Payakumbuh	99,76	99,09	88,53
Kota Pariaman	99,5	98,27	89,61
Provinsi Sumatera Barat	99,71	96,8	84,4

Sumber: BPS Sumatera Barat 2024

Sedangkan jika melihat perbandingan indikator pendidikan antara Kota Sawahlunto dengan daerah lain yang ada di Sumatera Barat tercatat bahwa Kota

[30] Seymour Martin Lipset, Op.cit. Hal. 74.

Sawahlunto selalu ada di atas rata-rata angka partisipasi sekolah yang ada di Sumatera Barat, bahkan memiliki gap yang cukup besar pada angka APS di umur 16-18 tahun dengan menempati urutan ke 2 dan hanya berada 0,7% dibawah kota Bukittinggi yang menempati posisi teratas.[31]

Perihal tingkat partisipasi pemilih di Kota Sawahlunto yang dikaitkan dengan rendahnya angka kemiskinan dan tingkat pendidikan, bisa dikatakan sejalan melihat beberapa tabel mulai dari indeks pembangunan manusia sampai angka partisipasi sekolah secara rinci, peneliti menemukan bahwa terdapat pengaruh yang besar antara status sosial ekonomi dengan partisipasi pemilih. Hal ini tentu sangat sesuai dengan apa yang dikatakan Seymour Martin Lipset yang mengatakan bahwa tingkat sosial ekonomi yang tinggi akan mendorong demokrasi menjadi lebih baik lagi, dalam artian kata yaitu tingkat partisipasi pemilih sebanyak banyaknya.[32]

Artinya dalam penelitian kali ini sangat menarik untuk membahas lebih lanjut bagaimana tingginya partisipasi pemilih di Kota Sawahlunto yang dipengaruhi oleh tingkat ekonomi yang ada di Kota Sawahlunto. Data tersebut ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,42 (2023), dan angka partisipasi sekolah menurut kelompok umur (16-18) mencapai 91,08% tertinggi kedua di seluruh kota/kab yang ada di Sumatera Barat. Sementara itu angka kemiskinan Kota Sawahlunto per 2024 sekitar 2,33 persen yang

[31] BPS Sumatera Barat, *"Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota Dan Kelompok Umur, 2024."* https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE3IzI=/angka-partisipasi-sekolah-aps-penduduk-berumur-5-18-tahun-menurut-kabupaten-kota-dan-kelompok-umur.html. Diakses pada Jumat, 13 Desember 2024 pukul 00.09.

[32] Seymour Martin Lipset, Op.cit. Hal. 72.

menjadikannya daerah no 2 angka kemiskinan terendah Indonesia, bahkan tahun 2023 berhasil menempati posisi pertama angka kemiskinan terendah di Indonesia.[33]

Peneliti juga berasumsi bahwa tingkat kesadaran politik juga memiliki pengaruh yang besar terhadap tingginya angka partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang mencapai 80,1% sehingga menempatkan Sawahlunto menjadi yang teratas angka partisipasi pemilih di Sumatera Barat pada Pilkada 2024. Disisi lain, mobilisasi politik juga memiliki peran penting terhadap tingginya angka partisipasi politik yang ada di Kota Sawahlunto. Mobilisasi dilakukan dalam mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu.

ASLI

KANTOR ADVOKAT DAN PENGACARA
S. NOFRIZAL & PARTNER
(PIJAR JUSTITIA LAW OFFICE)
Jl. Ks. Tubun No. 119 Kota Solok - Sumatera Barat
HP.WA. 0812.673.1263 BBM 5400FEBO Email: Pijar_news@Yahoo.co.id

Jakarta, 5 Desember 2024

Kepada
Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Nomor 579 Tahun 20024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024 Tanggal 03 Desember 2024.

Sumber: Permohonan PHPU MK RI 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025

Gambar 1. 1
Gugatan Kecurangan Pemilu yang Terstruktur, Masif, dan Sistematis

[33] BPS Provinsi Sumatera Barat.

a. Terjadinya kecurangan, ancaman, dan intimidasi, di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto,yang terindikasi melakukan Money Politik.
b. Terjadi kecurangan dan pelanggaran sehingga menyebabkan rusaknnya moral politik karena adanya dugaan money politik
c. Karena calon walikota sawahlunto dari paslon 01 tidak memenuhi persyaratan

Bahwa prinsip Konstitusional pemilu yang "Rahasia" tidak terpenuhi, karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya, beberapa pemilih menitipkan pencoblosannya kepada orang lain, yang dengan sendirinya membatalkan kerahasiaan pilihan yang bersangkutan.

1. Kasus Money Politik di desa kolok mudiak, Kecamatan Barangin Kota sawahluntotelah terjadi diduga praktek money politik di TPS 02 Desa kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota sawahlunto, yang terakam dalam 2 video terpisah, yang di Ketahui langsung serta diklarifikasi langsung oleh seorang **Anggota DPR-RI Rico Alviano st,**

2. Kronologi di Rusuna wayang berdurasi 1 menit
Terjadi percakapan antara NANI Dan teman teman, di duga teman temannya tersebut mendapat amplop yang berisi uang sebanyak 200.000 dari paslon1 .
Berdasarkan video tersebut Nani si perekam video mengkonfirmasi kepada para penerima uang yang kemarin katanya 500,000 dan Nani menyuruh para ibuk ibuk tersebut intuk membuktikan uang yang mereka terima , dan ternyata setelah amplop dibuka uang didalam itu (berisi 2 lembar uang pecahan 100.000).

Sumber: Permohonan PHPU MK RI 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025

Gambar 1. 2
Indikasi Mobilisasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Sawahlunto Tahun 2024

KANTOR ADVOKAT DAN PENGACARA
S. NOFRIZAL & PARTNER
(PIJAR JUSTITIA LAW OFFICE)
Jl. Ks. Tubun No. 119 Kota Solok - Sumatera Barat
HP/WA : 0812 673 1263 BBM : 5400FEBO Email :Pijar_news @ Yahoo. co.id

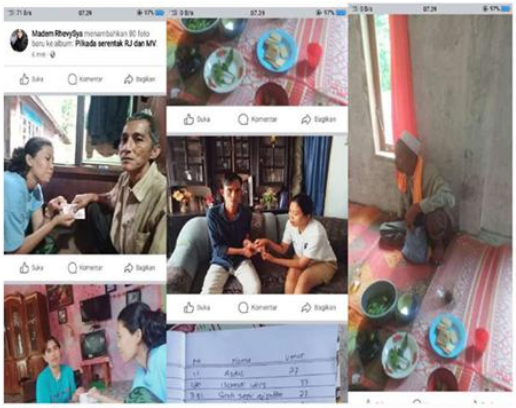

Sumber: Permohonan PHPU MK RI 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025

Gambar 1. 3
Bukti Mobilisasi Pada Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sawahlunto Tahun 2024

Mobilisasi yang dilakukan pada pemilihan umum dapat terjadi secara langsung seperti pengerahan masa dan tidak langsung seperti mempengaruhi cara pikir seseorang yang kemudian mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang dalam menentukan pilihan, hal ini dapat dilihat dari aktivitas mencari suara yang telah dilaksanakan oleh masing-masing calon. Pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kota Sawahlunto, pasangan penantang berhasil mengalahkan petahana dengan persentase tertinggi di Sumatera barat, dimana pasangan Riyanda- Jeffri berhasil menang 79,29% berbanding suara petahana Deri Asta yang hanya mencapai 20,71%.

Berangkat dari data sekunder yang terkait status sosial ekonomi per kota dan kabupaten di Sumatera Barat, kemudian mengelaborasikannya dengan teori terkait pengaruh status sosial ekonomi, tingkat kesadaran politik dan mobilisasi politik dengan partisipasi pemilih, maka hal inilah yang kemudian menjadi landasan dasar bagi peneliti untuk lebih lanjut melakukan penelitian terkait bagaimanakah Hubungan Status Sosial Ekonomi, Kesadaran Politik dan Mobilisasi Politik Terhadap Tingkat Partisipasi Pemilih Masyarakat Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan hubungan status sosial ekonomi (pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan) terhadap tingkat partisipasi pemilih masyarakat di Kota Sawahlunto pada pemilihan kepala daerah tahun 2024.

2. Untuk mendeskripsikan hubungan kesadaran politik terhadap tingkat partisipasi pemilih masyarakat di Kota Sawahlunto pada pemilihan kepala daerah tahun 2024.
3. Untuk mendeskripsikan hubungan mobilisasi politik terhadap tingkat partisipasi pemilih masyarakat di Kota Sawahlunto pada pemilihan kepala daerah tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

a) Secara Akademis

Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperkaya konsep mengenai bagaimana hubungan antara status sosial ekonomi, tingkat kesadaran politik dan mobilisasi politik terhadap tingkat partisipasi pemilih, dan pada penelitian ini peneliti akan membantu dengan kasus dan temuan yang akan diteliti. Kedepannya sumbangan teori dan analisis ini dapat berguna untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya

b) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penguat untuk menjelaskan serta mengetahui faktor yang mempengaruhi bagaimana hubungan antara status sosial ekonomi, kesadaran politik dan mobilisasi politik terhadap partisipasi pemilih di Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.